

INTEGRASI ASPEK HUKUM, ADMINISTRASI NEGARA, EKONOMI, DAN AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BERBASIS MASYARAKAT

¹Khairuddin Tampubolon✉, ¹Elazhari, ¹Jenda Ingan Mahuli, ¹Mahyudin Situmeang,
²Reza Hanafi Lubis, ¹Nirmadarningsih Hiya

¹Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia

²Universitas Muslim Nusantara Alwashliyah, Medan, Indonesia

Email: khoir.tb@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol14No2.pp256-260>

ABSTRACT

The purpose of writing this scientific paper is to determine the integration of multidisciplinary science in community-based mangrove forest management. The object of writing is the mangrove forest in Bagan Serdang, Pantai Labu District, Serdang Bedagai Regency. Community-based mangrove forest management is an important approach to ensure the sustainability of the ecosystem and the welfare of local communities. This scientific paper explores the integration of legal, state administration, economic, and accounting aspects in community-based mangrove forest management. By highlighting the importance of cooperation between various disciplines and compliance with regulations, this scientific paper seeks to provide a comprehensive framework for managing mangrove forests effectively and sustainably. The results of the discussion of this scientific paper are 1. The importance of the legal aspect to educate the public about the potential for conflict and customary law that applies among the community in the management of mangrove forests, 2) in the aspect of administrative science, it is necessary to accommodate the social response of the community to the regional regulations that are made, 3) The economic aspect is the need to educate the community in empowering mangrove forests in producing economic value such as ecotourism and processing of mangrove forest resources that can have economic value, 4) The accounting aspect is by suggesting the application of the mangrove kite concept, namely by involving 4 elements in the management of mangrove forests, namely: Government, Academics, Community and Private. From the results of this scientific paper, it is hoped that it can provide education to the community in optimizing the use of mangrove forests from the integration of various fields of science and will be able to provide solutions to obstacles that will occur.

Keyword: *Integration, Management, Mangrove Forest, Community Based.*

ABSTRAK

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui integrasi multi disiplin keilmuan dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat. Sebagai objek penulisan adalah hutan mangrove di Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Serdang Bedagai. Pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal. karya ilmiah ini mengeksplorasi integrasi aspek hukum, administrasi negara, ekonomi, dan akuntansi dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat. Dengan menyoroti pentingnya kerjasama antara berbagai disiplin ilmu dan kepatuhan terhadap regulasi, karya ilmiah ini berusaha memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola

hutan mangrove secara efektif dan berkelanjutan. Hasil pembahasan karya ilmiah ini yaitu 1. Pentingnya aspek hukum untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi konflik dan hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove, 2) pada aspek ilmu administrasi perlu dilakukan akomodasi dari respon sosial masyarakat atas peraturan daerah yang dibuat, 3) Aspek ekonomi yaitu perlu mengedukasi masyarakat dalam memberdayakan hutan mangrove dalam menghasilkan nilai ekonomi seperti ekowisata dan pengolahan sumber daya hutan mangrove yang dapat bernilai ekonomis, 4) Aspek Akuntansi yaitu dengan menyarankan penerapan konsep bakau kite yaitu dengan melibatkan 4 unsur dalam pengelolaan hutan mangrove yaitu: Pemerintah, Akademisi, Masyarakat dan Swasta. Dari hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan hutan mangrove dari integrasi berbagai bidang ilmu serta akan dapat menjadikan solusi terhadap kendala yang akan terjadi.

Kata Kunci: Integrasi, Pengelolaan, Hutan Mangrove, Berbasis Masyarakat.

PENDAHULUAN

Hutan mangrove adalah ekosistem yang vital bagi keseimbangan lingkungan, menyediakan perlindungan terhadap erosi pantai, habitat bagi berbagai spesies, dan sumber daya ekonomi bagi masyarakat pesisir. Namun, tekanan terhadap hutan mangrove akibat urbanisasi, industri, dan perubahan iklim semakin meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan pengelolaan yang holistik yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan kepentingan masyarakat lokal (Ostrom, 1990).

Pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal dalam upaya konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan berkelanjutan hutan mangrove. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem mangrove sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.

Komponen utama dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat:

1. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat lokal dilibatkan dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian hutan mangrove.
2. Pendidikan dan Penayadaran: Edukasi tentang pentingnya mangrove bagi ekosistem dan manfaatnya bagi masyarakat sekitar

dilakukan secara terus-menerus. Hal ini mencakup pelatihan mengenai teknik-teknik konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan.

3. Pemanfaatan Sumber Daya secara Berkelanjutan: Masyarakat diajarkan untuk memanfaatkan sumber daya hutan mangrove, seperti kayu, ikan, dan hasil laut lainnya, tanpa merusak ekosistem. Ini bisa termasuk budidaya ikan, kepiting, atau usaha ekowisata.
4. Rehabilitasi dan Konservasi: Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan rehabilitasi area mangrove yang rusak, misalnya dengan menanam bibit mangrove baru dan menjaga area tersebut dari ancaman seperti penebangan liar.
5. Penguatan Kelembagaan Lokal: Pembentukan atau penguatan kelembagaan lokal yang mengatur pengelolaan hutan mangrove menjadi penting. Ini mencakup pembentukan kelompok kerja atau asosiasi yang memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.
6. Kolaborasi dengan Pihak Lain: Kerjasama dengan pemerintah, LSM, dan institusi pendidikan sangat penting untuk menyediakan dukungan teknis, finansial, dan kebijakan yang mendukung pengelolaan mangrove berbasis masyarakat (Kehutanan, 2024).

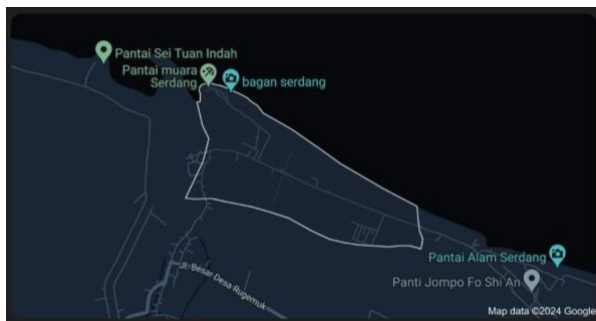
Dengan pendekatan ini, hutan mangrove dapat dijaga kelestariannya sambil tetap

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memperkuat ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir dan erosi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang berlandaskan pada sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan ilmiah lapangan primer, sekunder, dan tersier, sebagai sumber utama data referensi. Sumber-sumber tersebut dipilah, diteliti, dan disimpulkan secara metodis mengenai masalah yang diteliti.

Lokasi penelitian di hutan mangrove di Bagan Serdang Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Serdang Bedagai.



Gambar 1. Peta Lokasi Pantai Kawasan Bagan Serdang Pantai Labu Serdang Bedagai.

HASIL PENELITIAN

Aspek Hukum

Aspek hukum memainkan peran penting dalam pengelolaan hutan mangrove. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk melindungi hutan mangrove dari eksploitasi berlebihan dan kerusakan. Beberapa undang-undang yang relevan mencakup perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat adat. Implementasi peraturan yang efektif membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Dengan garis pantai sekitar 81.000 kilometer, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan banyak potensi yang belum dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan

pembangunan. Kekuasaan untuk mengelola sumber daya di wilayah yang telah ditetapkan berada di tangan daerah, yang merupakan tempat yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena potensinya yang sangat besar, wilayah pesisir diberi kewenangan untuk dikelola oleh daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Datau, 2019).

Administrasi Negara

Administrasi negara berkaitan dengan tata kelola dan kebijakan publik dalam pengelolaan hutan mangrove. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat, termasuk penyediaan dana, pelatihan, dan dukungan teknis. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar dijalankan dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal (Ferdian et al., 2021).

Ekonomi

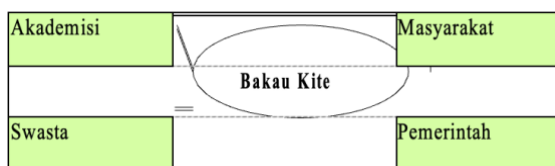
Aspek ekonomi dalam pengelolaan hutan mangrove mencakup pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini bisa meliputi budidaya perikanan, ekowisata, dan pemanfaatan produk non-kayu seperti madu dan obat-obatan tradisional. Pendekatan ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat (Jaya, 2022).

Akuntansi

Akuntansi dalam pengelolaan hutan mangrove penting untuk mencatat dan melaporkan penggunaan sumber daya secara transparan. Sistem akuntansi yang baik dapat membantu memantau pendapatan dan pengeluaran, memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pengelolaan hutan mangrove digunakan secara efisien. Selain itu, laporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donor terhadap program pengelolaan hutan mangrove. Serta

menyarankan penerapan konsep bakau kite yaitu: Mengutip pandangan Wahyu Lelly (2017) yang mengusulkan gagasan quadruple helix sebagai sarana untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan teknologi dalam sektor kreatif. Untuk mendukung kinerja inovasi, kreativitas dan inovasi saling terkait. Gagasan "quadruple helix" memajukan inovasi dalam bisnis, akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil, dan meramalkan bagaimana keempat domain ini akan berkolaborasi untuk mempercepat penyebaran ide-ide baru. Komponen utama dari konsep kolaborasi quadruple helix adalah cara-cara di mana pemerintah, akademisi, dan bisnis berinteraksi satu sama lain dengan cara yang bijaksana, efisien, dan produktif. mengilustrasikan gagasan strategi kolaborasi *quadruple helix*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti gambar berikut (Setyanti, 2017):



Gambar 2. Konsep Bakau Kite

Komunitas akademis, sektor bisnis, pemerintah, dan masyarakat bersatu untuk membentuk pendekatan kolaborasi quadruple helix, yang merupakan sinergi dari empat kelompok. Taktik ini merupakan formulasi yang berguna yang mendukung gagasan atau penemuan "layang-layang bakau". Kerja sama keempat sektor tersebut perlu diseimbangkan dan dilakukan secara efektif dan efisien. Akademisi dalam situasi ini dituntut untuk memiliki perangkat, pengetahuan, dan teknologi yang diperlukan untuk menghasilkan berbagai penemuan dan penemuan yang bermanfaat. Mereka juga harus mampu melakukan penelitian atau studi yang dapat berfungsi sebagai sumber informasi terkini dalam hal pemetaan konsep dan inovasi pembangunan. Kalangan bisnis mengelola kapitalisasi atau investor yang menawarkan keuntungan sosial dan finansial. Diharapkan masyarakat akan memimpin dalam pariwisata ekonomi dan berkontribusi pada

upaya penguatan ekonomi dengan menerapkan ide layang-layang bakau dalam sektor kegiatan bisnis, yang akan meningkatkan pendapatan rata-rata rumah tangga masyarakat. Sementara pemerintah membuat undang-undang yang menguntungkan untuk memastikan, menegakkan, dan mendorong hubungan antarmanusia. Menurut penulis, pendekatan yang sangat tepat untuk melaksanakan penemuan dan kelanjutan konsep layang-layang bakau adalah kolaborasi quadruple helix (Latif, 2018).

KESIMPULAN

Integrasi aspek hukum, administrasi negara, ekonomi, dan akuntansi dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat sangat penting untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara berbagai disiplin ilmu dan partisipasi aktif masyarakat lokal adalah kunci untuk keberhasilan pengelolaan hutan mangrove. Dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, kita dapat melindungi hutan mangrove dan memanfaatkan sumber dayanya secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Hasil pembahasan karya ilmiah ini yaitu:

1. Pentingnya aspek hukum untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi konflik dan hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove,
2. Pada aspek ilmu administrasi perlu dilakukan akomodasi dari respon sosial masyarakat atas peraturan daerah yang dibuat,
3. Aspek ekonomi yaitu perlu mengedukasi masyarakat dalam memberdayakan hutan mangrove dalam menghasilkan nilai ekonomi seperti ekowisata dan pengolahan sumber daya hutan mangrove yang dapat bernilai ekonomis,
4. Aspek Akuntansi yaitu dengan menyarankan penerapan konsep bakau kite yaitu dengan melibatkan 4 unsur dalam pengelolaan hutan mangrove yaitu: Pemerintah, Akademisi, Masyarakat dan Swasta.

Dari hasil karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan hutan

mangrove dari integrasi berbagai bidang ilmu serta akan dapat menjadikan solusi terhadap kendala yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Datau, R. (2019). Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Gorontalo Law Review*. 2(2), 2019.
- Ferdian, A., SM, S., & Darmawati, D. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Dalam Rangka Pelestarian Hutan Mangrove. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 10(1), 54–66. <https://doi.org/10.35724/sjias.v10i1.3296>
- Jaya, E. E. (2022). Analisis Sensitivitas dan Status Keberlanjutan Untuk Dimensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Pagatan Besar. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, March*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13533>
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2024). *Peta Mangrove Nasional Tahun 2021: Baseline Pengelolaan Rehabilitasi Mangrove Nasional*.
- Latif, B. (2018). Optimalisasi pemanfaatan hutan mangrove berbasis ekowisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir kota tanjungpinang menggunakan konsep lingkungan bakau kite. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 1(2), 65–78.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Setyanti, S. W. L. H. (2017). *The quadruple helix model: enhancing innovative performance of Indonesian creative industry*.